



2024

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)





**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 188.45/0294 /Huk-BAPPELITBANGDA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024**

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Tahun 2024 telah diverifikasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 261);
 25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
 26. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);

Memutuskan :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- Bab V Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- Bab VI Penutup.

KEDUA

: Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang telah diverifikasi adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. RSUD dr. Murjani Sampit;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Timur;
15. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur;
17. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur;
22. Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
23. Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur;
24. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur;
25. Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur;
27. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
29. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur;

31. Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Timur;
32. Kecamatan Kota Besi
33. Kecamatan Cempaga;
34. Kecamatan Mentaya Hulu;
35. Kecamatan Parenggean;
36. Kecamatan Baamang;
37. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang;
38. Kecamatan Mentaya Hilir Utara;
39. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan;
40. Kecamatan Pulau Hanaut;
41. Kecamatan Antang Kalang;
42. Kecamatan Teluk Sampit;
43. Kecamatan Seranau;
44. Kecamatan Cempaga Hulu;
45. Kecamatan Telawang;
46. Kecamatan Bukit Santuai;
47. Kecamatan Tualan Hulu;
48. Kecamatan Telaga Antang; dan
49. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Timur.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang telah disahkan/ditetapkan menjadi pedoman dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 07 Agustus 2023
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
U.p Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
U.p Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit.
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor :
188.45/0294/Huk-BAPPELITBANGDA/2023 tentang Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2023



2024

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas bimbingan dan karuniaNya sehingga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) BPBD merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Perubahan Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024. Selain itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja serta strategi pada setiap unit kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berkewajiban untuk dapat melaksanakan program/ kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2024.

Demikian Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini disusun. Semoga segala program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Sampit, 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



MUL TAZAM, ST, M MT
Pemimpin Muda
Nip. 19680528 19903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I PENDAHULUAN		
1.1 Latar Belakang		1
1.2 Dasar Hukum		2
1.3 Maksud dan Tujuan		4
1.4 Sistematika Penulisan		5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra Tahun Lalu		6
2.2 Analisa Kinerja SKPD		43
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD		45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		49
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat		49
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi		51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD		55
3.3 Program dan Kegiatan		57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT PERANGKAT DAERAH		
.....		61
BAB V PENUTUP		
.....		62

DAFTAR TABEL

Tabel TC 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Kotim
Tabel TC 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kab.Kotawaringin Timur
Tabel TC 31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Kotawaringin Timur
Tabel TC 32	Usulan Program dan Kegiatan Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tabel TC 33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 BPBD Kab. Kotim
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Satuan Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan tahunan pada level Satuan Perangkat Daerah dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis yang berisikan informasi rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi kerangka anggaran dan regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja serta bagaimana pengorganisasi program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja tahun lalu, tujuan dan sasaran Renja serta program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Proses penyusunan Renja juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memerhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan

RKPD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menitikberatkan pada pembahasan sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah serta masyarakat dalam pencapaian Visi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 merupakan rancangan program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen RKPD tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang menjadi landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
7. Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 2) ;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.;
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 20);.
13. Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0294/Huk-BAPPELITBANGDA/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 :

- 1) Memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 dengan program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 ;
- 2) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan;
- 3) Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
- 4) Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 :

- 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
- 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana;
- 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana;
- 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2024;
- 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistimatika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistimatika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
- 2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja tahun 2022 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2022 sesuai penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

2.1.1 Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Capaian Indikator Utama merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun **2022** dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0413/Huk-ORG/2021 Tanggal 15 Nopember 2021** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja (out comes) .

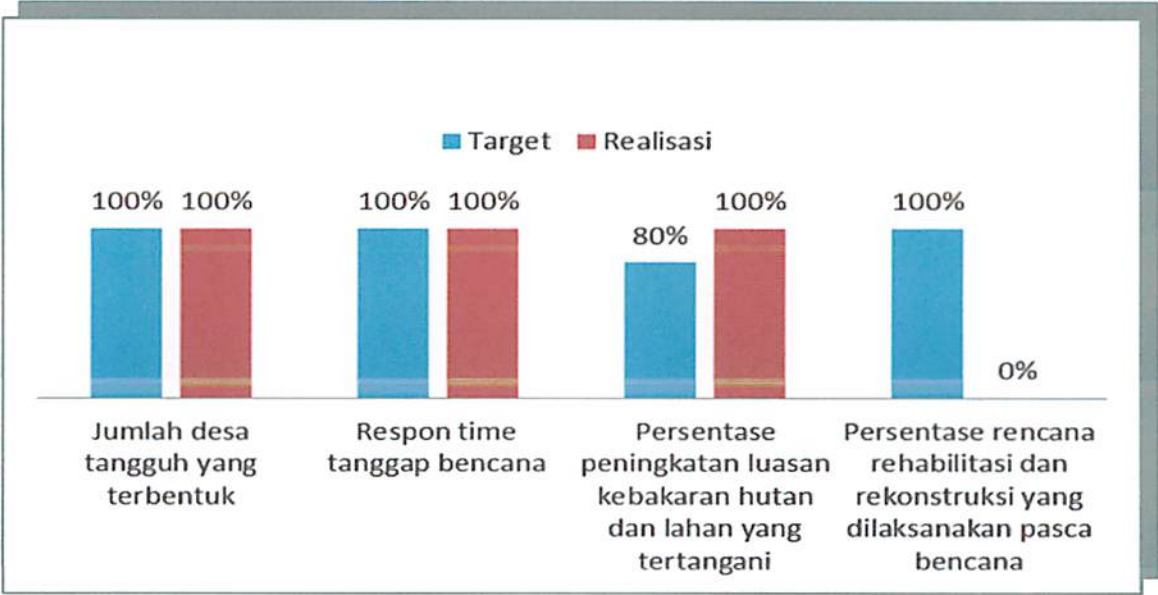
Gambaran capaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur secara lengkap dapat dilihat pada Pengukuran Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022.

Tabel 2.1
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah desa tangguh yang terbentuk	2 desa	2 desa	100 %	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Respon time tanggap bencana	100 %	100 %	100 %	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Persentase peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan yang tertangani	80%	100 %	125 %	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana	100%	0 %	0 %	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dari hasil tabel capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas dapat dilihat bahwa semua realiasi dapat dicapai sesuai target. Hanya pada target Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana yang sangat rendah dengan realisasi 0 %, Sedangkan indikator Persentase peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan yang tertangani melampaui target mencapai 125 %.

Untuk lebih jelas Capaian IKU dapat disampaikan pada grafik berikut :

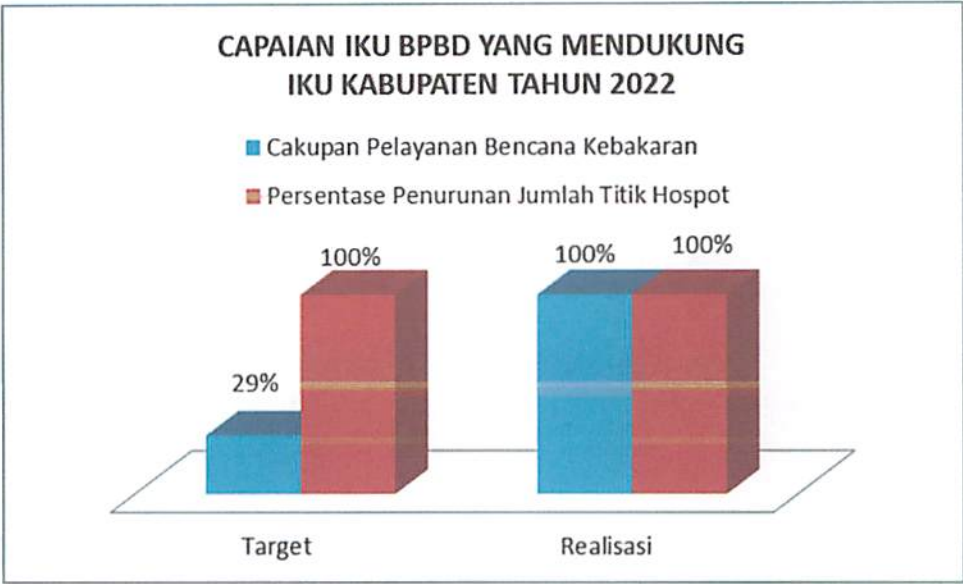


Selain Indikator Kinerja Utama OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga menunjang Indikator Kinerja Utama Kabupaten seperti yang tercantum dalam **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0390/Huk.ORG/2021** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dan sebanyak 2 (dua) indikator kinerja (out comes) . Gambaran capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung Indikator Kinerja Utama Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MISI 5 : MEWUJUDKAN KOTAWARINGIN TIMUR YANG NYAMAN, LESTARI DAN BERBUDAYA							
SASARAN 22							
I.	Menurunnya resiko bencana kebakaran lahan,hutan dan permukiman						
1.		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	29.41	100	340.02	Sangat tinggi	Bidang Kedaruratan dan Logistik
2		Persentase Penurunan Jumlah Titik Hospot	100	100	100	Sangat tinggi	Bidang Kedaruratan dan Logistik

Dari hasil tabel capaian Indikator Kinerja Utama yang mendukung Indikator Kinerja Utama Kabupaten tersebut di atas dapat dilihat bahwa semua realiasi dapat dicapai sesuai target, bahkan untuk indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran melebihi target yaitu 340.02 % yang juga dapat di jelaskan pada grafik berikut :



2.1.2 Pengukuran , Evaluasi dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2022

A. Pengukuran Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja Utama yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Analisis capaian kinerja dilakukan dalam mengungkap dan mengurai seberapa jauh suatu rencana target kinerja dapat dicapai, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta upaya yang telah dilakukan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki pada tahun akan datang. Bagian ini akan diuraikan evaluasi dan analisis kinerja yang menjelaskan capaian kinerja sasaran strategis.

Pengukuran Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

Tahun **2022** adalah tahun kedua pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dari sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

**SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS
PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**INDIKATOR KINERJA 1 : JUMLAH DESA TANGGUH
YANG TERBENTUK**

Formulasi perhitungan indikator kerja pertama adalah :

$$\frac{\text{Realisasi desa tangguh yang terbentuk di daerah rawan bencana tahun 2022}}{\text{Target Jumlah desa tangguh bencana tahun 2022}} \times 100$$

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah desa tangguh yang terbentuk	2 desa	2 desa	100 %

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kapasitas pelayanan penanggulangan Bencana salah satu indicator kinerjanya adalah jumlah desa tangguh yang terbentuk. Pada tahun 2022 pembentukan desa tangguh bencana dilaksanakan di 2 (dua) desa/kelurahan di 2 (dua) kecamatan yaitu kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu sebagai desa tangguh kebakaran dan desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu sebagai desa tangguh banjir. Dalam kegiatan pembentukan Desa Tangguh ini juga diserahkan bantuan perahu dan peralatan pemadam kebakaran kepada masyarakat setempat. Pembentukan desa tangguh bencana telah dilaksanakan dan terealisasi 100 % , dengan capaian kinerja 100 %. Pembentukan desa tangguh bencana merupakan upaya mitigasi bencana yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat terutama di kawasan rawan bencana. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan desa tangguh bencana meliputi sosialisasi mengenai kebencanaan, simulasi penanganan korban bencana dan pembentukan tim-tim penanggulangan bencana dalam lingkup desa/kelurahan. Dengan dibentuknya desa tangguh bencana ini, diharapkan masyarakat dapat memahami tentang kebencanaan, mengerti tentang resiko dan dampak kejadian bencana, dapat memberikan pertolongan pertama pada korban saat terjadi bencana serta terjaminnya keamanan saat terjadi bencana. Kegiatan melibatkan peran aktif dari masyarakat desa, perangkat desa,

relawan, Tim Reaksi Cepat (TRC), Babinkamtibmas, Babinsan dan Trantib Kecamatan. Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendukung indikator kinerja tersebut adalah :

Tabel 2.4
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Indikator Kinerja 1

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan yang mendukung capaian indikator pembentukan desa tangguh adalah Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan dana sebesar **Rp. 135.000.000,-** sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 realisasi keuangan mencapai **Rp. 126.206.700** atau **93,49 %** Mitigasi bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan bencana, menjadi salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang mungkin dapat terjadi.

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu :

- 1) sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana;
- 2) mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika bencana timbul, dan
- 3) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana.

Pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana dalam **kurun waktu 2015-2022** telah terbentuk **20 desa / kelurahan tangguh bencana** seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini : Dan pada Tahun 2023 akan kembali direncanakan pembentukan desa tangguh di 1 (satu) desa yaitu desa Satiruk Kecamatan Pulau Hanaut yang merupakan usulan masyarakat dalam Musrenbang RKPD tahun 2023. Selain Pembentukan desa/kelurahan tangguh, juga telah terbentuk Masyarakat Peduli Api (MPA) sebanyak 34 MPA yang terdiri dari 132 desa yang tersebar di 168 desa dan 17 kelurahan. Pembentukan dan pelatihan Masyarakat Peduli Api (MPA) pada 17 kecamatan sebagai garda terdepan untuk upaya pencegahan,

kesiapsiagaan serta penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Seharusnya target pembentukan desa tangguh bencana ini dapat terus ditingkatkan dan perlu ditinjau kembali dari tahun ketahun agar seluruh

desa ataupun kelurahan di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana, karena dampak dari bencana alam yang cukup tinggi, bukan hanya kerusakan infrastruktur, sarana dan prasarana namun juga korban jiwa dan kerugian ekonomi.

Selain pembentukan desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam dengan cara pembuatan media informasi bencana berupa leflet, stiker, spanduk dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana. Dengan adanya sosialisasi dan media informasi bencana tersebut seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya masyarakat di daerah rawan bencana dapat mengetahui informasi bencana daerahnya.

FOTO-FOTO PELAKSANAAN DESA TANGGUH BENCANA TAHUN 2022







**SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS PELAYANAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

**INDIKATOR KINERJA 2 : RESPON TIME TANGGAP
BENCANA**

Indikator kinerja sasaran 2 (dua) ini diukur dengan formulasi sebagai berikut :

**Jumlah kasus bencana yang tertangani
selama waktu 1x24 jam tahun 2022**

x

100

Jumlah kasus bencana tahun 2022

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Respon time tanggap bencana	100%	%	100 %

Respon Time Tanggap Bencana, dimana realisasi mencapai 100% dari target yang sudah ditentukan (100%). Indikator Respon time Tanggap Bencana ditargetkan 1x24 Jam hal ini mempunyai arti bahwa semua kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur telah di respon paling lambat 1x24 jam. Hal ini berarti indikator kinerja kedua pada sasaran sudah optimal memenuhi target pencapaian sehingga untuk tahun berikutnya tetap dilakukan upaya lebih berdasarkan evaluasi mendalam berkaitan dengan program kegiatan. di lingkup indikator ke 2 yaitu Respon Time Tanggap Bencana.

Tabel 3.6
Data Kejadian Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur

No.	JENIS BENCANA	KEJADIAN TAHUN 2022
1	Kebakaran Hutan dan lahan	11
2	Tanah longsor	-
3	Banjir	19
4	Longsor	-
5	Abrasi Pantai	1
6	Korban hanyut/tenggelam	1
Jumlah		32

Sumber data : Posdaplops BPBD Kab.Kotim Tahun 2022

Apabila melihat jumlah titik kejadian, tahun 2022 tercatat sebanyak 32 kejadian bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur secara keseluruhan mengalami penurunan jika dibandingkan jumlah kejadian pada tahun 2021 yang berjumlah 60 kejadian . Namun untuk kejadian banjir mengalami peningkatan karena sepanjang tahun 2022 curah hujan tinggi yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terendam banjir. Peningkatan atau penurunan kejadian bencana tersebut

bukan merupakan kinerja yang dapat ditargetkan dikarenakan semua kejadian bencana merupakan faktor alam dan faktor non alam yang sulit diprediksi. Namun demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berupaya melakukan pencegahan dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mampu mencegah, menangani dan merekonstruksi kebencanaan. Penanganan bencana alam di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilaksanakan dengan baik oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur dengan segera menindaklanjuti setiap laporan kejadian bencana baik dari masyarakat, pejabat setempat maupun dari para relawan. Setelah mendapati laporan kejadian, Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur langsung mengecek lokasi dan melakukan koordinasi seperti Polsek, TNI, maupun tim relawan untuk bersama-sama melakukan penanganan bencana. Setiap kejadian bencana wajib dilaporkan kepada Kepala Daerah yaitu Bupati dan Instansi di atasnya yaitu BPBD Propinsi Kalimantan Tengah maupun BNPB Pusat sebagai tindak lanjut dan dasar pengajuan bantuan bagi korban bencana. Dengan adanya waktu tanggap yang di miliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal penanganan bencana, waktu tanggap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu 1 x 24 jam dalam penanganan bencana, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sudah memiliki tim penanggulangan bencana di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di wilayah daerah rawan bencana, yaitu adanya Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Relawan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur , Komunitas Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan seluruh unsur Penanggulangan Bencana yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dalam proses penanganan bencana selalu cepat. Selain unsur SDM yang di miliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penanganan bencana ada juga Sarana dan Prasarana penanggulangan bencana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal penanggulangan bencana seperti kendaraan operasional, alat

pendukung penanggulangan bencana yang dibutuhkan dalam penanganan bencana serta logistik kebencanaan. Dari semua jumlah kejadian bencana yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah dapat di tangani dengan waktu yang sangat cepat sesuai waktu tanggap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menangani bencana.

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

Tabel 2.7
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Indikator Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Darurat Bencana Kab
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Kegiatan yang mendukung capaian indikator Respon time tanggap bencana ada 6 (enam) kegiatan seperti tabel di atas dengan total dana sebesar **Rp. 4.051.290.000,-** bersumber dari dana APBD Kabupaten dan DBH DR. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 realisasi keuangan mencapai **Rp. 997.350.743,-** atau **24,61 %**. Rendahnya realisasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasi 0 %, tidak dapat dilaksanakan karena

pada dasarnya kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Kontijensi seperti tertuang di dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana, sedangkan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur belum mengadakan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi. Penyusunan Rencana Kontijensi akan disusun pada tahun anggaran 2023.

2. Sub kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan jumlah dana sebesar **Rp. 3,187,290,000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 696.969.963,-** atau **21,87 %**. Rendahnya penyerapan realisasi anggaran ini dikarenakan Pos Komando Kebakaran Hutan dan Lahan hanya melakukan patroli keliling ke daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Faktor lain adalah karena curah hujan yang tinggi.

sepanjang tahun 2022 menyebabkan titik api dan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan drastis. Namun walaupun demikian , target penurunan titik hotspot dan kebakaran hutan dan lahan tercapai karena dipengaruhi cuaca yang tidak mengalami musim kemarau.

FOTO-FOTO KEJADIAN BENCANA TAHUN 2022









**SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS PELAYANAN
PENANGGULANGAN BENCANA**

**INDIKATOR KINERJA 3 : PROSENTASE PENINGKATAN LUAS
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
YANG TERTANGANI**

Formulasi perhitungan indikator kerja 3 (tiga) adalah :

$$\frac{\text{Luasan kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditangani pada tahun 2022}}{\text{Jumlah luasan keseluruhan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022}} \times 100$$

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan yang tertangani	80%	100%	125 %

Tahun 2022, bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak **11 kejadian** dengan luasan kebakaran sebesar **35,55 % HA**. Yang dapat tertangani sebanyak 10 kejadian dan dilakukan pemadaman lewat darat untuk daerah yang dapat terjangkau seluas **32,03 %**, **1,5 HA** padam oleh hujan. Dengan

demikian indikator Kinerja 3 (tiga) Prosentase Peningkatan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan yang dapat Tertangani untuk Tahun 2022 sebesar 100% menunjukan target yang ditetapkan tercapai bahkan melampaui target. Tercapainya target luasan kebakaran yang dapat ditangani karena seluruh luasan kebakaran di Tahun 2022 dengan kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi, kebakaran hutan dan lahan yang tidak dapat terjangkau padam dengan sendirinya. Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung sasaran tersebut adalah :

Tabel 2.9
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung
Indikator Kinerja 3

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Kegiatan yang mendukung capaian indikator Respon time tanggap bencana ada 1 (satu) yaitu Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan total dana sebesar **Rp. 3,187,290,000,-** bersumber dari DBH DR. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 realisasi keuangan mencapai **Rp. 696.969.963,-** atau 21,67 %. Rendahnya realisasi ini dikarena Pos Komando Kebakaran Hutan dan Lahan hanya melakukan patroli keliling ke daerah rawan bencana kabakaran hutan dan lahan. Faktor lain adalah karena curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 menyebabkan titik api dan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan drastis. Namun walaupun demikian , target penurunan titik hotspot dan kebakaran hutan dan lahan tercapai karena dipengaruhi cuaca yang tidak mengalami musim kemarau.

Pelaksanaan kegiatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana berkedudukan di Kantor Pusdaplops BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi siaga darurat bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan siga darurat bencana. Pos Komando siaga Darurat Bencana di Kabupaten Kotawaringin. Pos Komando Siaga Darurat Berencana ini didukung oleh unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, TNI, POLRI, DAMKAR, Manggala Agni, Instansi terkait, SAR, Kecamatan, KPHP dan masyarakat yang tergabung dalam MPA (Masyarakat Peduli Api). Pos Komando, Adalah Pos Utama Yang Menjadi Pusat Kendali

Operasi, Perencanaan Kegiatan, Pengumpulan Data, Koordinasi Lintas Lini, Penyusunan Laporan Dan Penyampaian Informasi Terpusat Dari Seluruh Kegiatan Penanganan Karhutla Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur juga di bentuk 7 (tujuh) Pos Lapangan adalah Pos dibawah kendali Pos Induk Komando dengan fungsi penanganan lapangan yang difokuskan pada kecamatan paling rawan karhutla. dilengkapi dengan peralatan dan personil yang memadai untuk dapat melakukan tindakan mulai pencegahan, penanganan sampai penegakan hukum lokasi **9 (sembilan) pos lapangan** ini antara lain :

1. Pos Komando Lapangan Kecamatan Mentawa Baru Ketapang
2. Pos Komando Lapangan Kecamatan Kota Besi-Kecamatan Cempaga Hulu
3. Pos Komando Lapangan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
4. Pos Komando Lapangan Kecamatan Parenggean
5. Pos Komando Lapangan Baamang
6. Pos Komando Lapangan Kecamatan Mentaya Hilir Utara
7. Pos Komando Lapangan Kecamatan TelukSampit
8. Pos Komando Lapangan Kecamatan Cempaga
9. Pos Komando Lapangan Kecamatan Mentaya Hulu

Tugas pokok harian dari Pos komando lapangan ini adalah :

1. **Monitoring kawasan (sumber air, kedalaman gambut, tinggi muka air, penumpukan bahan bakaran, cuaca, aktivitas masyarakat yang berisiko terjadinya karhutla)**
2. **Sosialisasi (anjangsana, penyuluhan dll)**
3. **Pencarian informasi dan pemetaan masalah**
4. **Melakukan groundcheck hotspot apabila terdeteksi muncul hotspot di wilayah kerja**
5. **Pemadaman dini apabila terjadi kebakaran, meminta bantuan posko apabila membutuhkan dukungan**

Tugas harian ini setiap harinya disampaikan melalui WA atau laporan tertulis ke Pos Komando Induk Karhutla sehingga laporan secara harian dan kondisi dari lapangan dapat selalu terpantau

FOTO-FOTO KEPENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
OLEH POSKO KARHUTLA





SASARAN : MENINGKATNYA KAPASITAS PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA			
INDIKATOR	KINERJA	4: PERSENTASE REHABILITASI REKONSTRUKSI DILAKSANAKAN BENCANA	RENCANA DAN YANG PASCA

Formulasi perhitungan indikator kerja 4 (empat) adalah :

Jumlah rehabilitasi dan rekontruksi
pasca bencana tahun 2022

Jumlah rencana rehabilitasi dan
rekonstruksi tahun 2022

x 100

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana	100%	0 %	0 %

Terkait dengan sasaran di atas, untuk tahun 2022 kegiatan Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana tidak mencapai target dikarenakan kegiatan ini tidak dianggarkan dalam DPA –SKPD BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022. Selain itu utk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana terdampak bencana tidak lagi dilakukan

oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur namun dialihkan ke instansi teknis yaitu Dinas PU dan PR Kabupaten Kotawaringin Timur.

Aspek penting dari meningkatnya pemulihan wilayah/ daerah pasca bencana bisa dilihat antara lain dari perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pengukuran Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten

Capaian Indikator merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mendukung kinerja Pemerintah Daerah untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotawaringin Timur Tahun 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 2. 11
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 IKU Kabupaten

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Menurunnya resiko bencana kebakaran lahan,hutan dan permukiman	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	29.41 %	100%	340,02 %

Formulasi perhitungan indikator kerja 3 (tiga) adalah :

Luasan kebakaran hutan dan lahan
yang dapat ditangani pada tahun 2022

Jumlah Luasan keseluruhan kebakaran
hutan Dan lahan pada tahun 2022

33,55

33,55

x 100

x 100 %

= 100 %

Tahun 2022, bencana kebakaran hutan dan lahan sebanyak **11 kejadian** dengan luasan kebakaran sebesar **32,03 % HA**. Yang dapat tertangani sebanyak 10 kejadian dan dilakukan pemadaman lewat darat untuk daerah yang dapat terjangkau seluas **32,03 %** sedangkan 1 (satu) kejadian seluas **1,5 HA** teratasi oleh hujan yang terus menerus sehingga padam dengan sendirinya, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.12
Kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2023
di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Kecamatan	Jumlah Kejadian	Jumlah Penanganan Kejadian	Luas Lahan Terbakar (HA)	Keterangan Luas Lahan Terbakar Perwilayah (HA)
1	Teluk Sampit	3	3	17.75	Wilayah Selatan
2	Mentaya Hilir Selatan	-	-	-	
3	Mentaya Hilir Utara	1	1	6	
4	Pulau Hanaut	-	-	-	
5	Mentawa Baru Ketapang	6	6	8.3	32.05
6	Seranau	-	-	-	95.53%
7	Baamang	1	-	1.5	Wilayah Tengah
8	Kota Besi	-	-	-	
9	Telawang	-	-	-	
10	Cempaga	-	-	-	
11	Cempaga Hulu	-	-	-	1.5
12	Parenggean	-	-	-	4.47%
13	Mentaya Hulu	-	-	-	Wilayah Utara
14	Tualan Hulu	-	-	-	
15	Bukit Santuai	-	-	-	
16	Telaga Antang	-	-	-	
17	Antang Kalang	-	-	-	0
TOTAL		11	10	33.53	33.55
PERSENTASE					100.00%

Sumber data : Bidang Kedaruratan dan logistic

Dengan demikian indikator Kinerja Cakupan pelayanan bencana kebakaran

hutan dan lahan yang dapat tertangani untuk Tahun 2022 sebesar 100% menunjukkan target yang ditetapkan tercapai bahkan melampaui target. Tercapainya target luasan kebakaran yang dapat ditangani karena seluruh luasan kebakaran di Tahun 2022 dengan kondisi cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi, kebakaran hutan dan lahan yang tidak dapat terjangkau padam dengan sendirinya.

2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Persentase penurunan jumlah titik hotspot dapat dilihat dalam tabel indikator kinerja di atas, dimana persentase penurunan jumlah titik api dengan target 100 %, terealisasi 100 % dengan capaian kinerja 100%, dan ini artinya target tercapai sesuai yang telah ditetapkan. Formulasi perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tindakan yang dilakukan}}{\text{Jumlah titik api riil}} \times 100 = 100 \%$$

$$\frac{116}{116} \times 100 = 100 \%$$

Keterangan : Jumlah titik hotspot yang dilakukan tindakan sampai tahun 2022 = 116
 Jumlah titik hotspot tahun 2022 = 116

TABEL 2.13
PEMETAAN HOTSPOT DI KABUPATEN KOTIM TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TITIK HOTSPOT
1.	Teluk Sampit	12
2	Mentaya Hilir Selatan	0
3	Mentaya Hilir Utara	3
4	Pulau Hanaut	1
5	Mentawa Baru Ketapang	1
6	Seranau	0
7	Baamang	0
8	Kota Besi	1
9	Telawang	7
10	Cempaga	2
11	Cempaga Hulu	10
12	Parenggean	16
13	Mentaya Hulu	6
14	Tualan Hulu	3
15	Bukit Santuai	7
16	Telaga Antang	5
17	Antang Kalang	42
JUMLAH		116

Sumber data : Bidang Kedaruratan dan logistik

Kecamatan Seranau, Kecamatan Baamang dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sepanjang tahun 2022 tidak terdeteksi titik hotspot. Titik hotspot terbanyak berada di Kecamatan Antang Kalang sebanyak 42 hot spot, diikuti oleh Kecamatan Parenggean sebanyak 16 hot spot, Kecamatan Teluk Sampit sebanyak 12 hot spot dan Kecamatan Cempaga Hulu sebanyak 10 hot spot. Keberhasilan tercapainya target Persentase penurunan titik api (hot spot) selain dilakukan pemadaman oleh tim yang tergabung dalam satuan tugas Kebakaran Hutan dan Lahan, juga setelah dilakukan groundchek ke lokasi titik api atau hot spot titik api tersebut telah padam dengan sendirinya karena intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan terendam air atau banjir.

Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendukung misi ke 5 yaitu *Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya* dengan sasaran menurunnya resiko bencana kebakaran lahan, hutan dan permukiman tersebut adalah :

Tabel 2.14
Program Kegiatandan Sub Kegiatan yang Mendukung
Sasaran Kinerja

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3,187,290,000,-	696.969.963,- atau 21,67 %.

Rendahnya realisasi ini dikarena Pos Komando Kebakaran Hutan dan Lahan hanya melakukan patroli keliling ke daerah rawan bencana kabakaran hutan dan lahan. Faktor lain adalah karena curah hujan yang tinggi menyebabkan titik api dan kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan drastis. Namun walaupun demikian , target penurunan titik hotspot dan kebakaran hutan dan lahan tercapai karena dipengaruhi musim penghujan yang panjang di tahun 2022.

B. Membandingkan Antara Realiasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tabel 2.15
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

No	SASARAN	INDIKATO R KINERJA	2021			2022		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkat nya Kapasitas Pelayanan Penanggul angan Bencana	Jumlah desa tangguh yang terbentuk	2 desa	1 desa	50%	2 desa	2 desa	100%
		Respon time tanggap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan yang tertangani	75%	100%	30.50%	8000%	100%	125%
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana	100%	0%	0%	100%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja ada peningkatan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021, dimana sebanyak 2 (dua) indikator kinerja memenuhi target dan 1 (satu) kinerja yang melampaui target yaitu indikator kinerja Persentase peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan yang tertangani. Sedangkan indikator kinerja Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana tidak mencapai target disebabkan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana sejak tahun 2021 dilaksanakan oleh instansi teknis yaitu Dinas PU dan PR Kabupaten Kotawaringin Timur.

C. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi bupati Kebumen Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

menetapkan tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 (lima) tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun						Kondisi pada akhir periode RENSTRA
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah		Persentase peningkatan Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah							
		Meningkatnya penanganan Penanggulang an Bencana	1 Prosentase jumlah desa tangguh yang terbentuk	2 desa	2 desa	3 desa	3 desa	4 desa	5 desa	19 desa
			2 Respon time tanggap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
			3 Prosentase peningkatan luas kebakaran dan lahan yang tertangani	75%	80%	85%	85%	90%	90%	90 %
			4 Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
2.	Peningkatan kualitas tata kelola Penanggulan gan Bencana		Meningkatn ya kualitas tata kelola Penanggulan gan Bencana							
		Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi Penanggulang an Bencana	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	

Tabel 2.17
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2026	REALISASI S/D TAHUN 2022	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana	Jumlah desa tangguh yang terbentuk	19 desa	3 desa	15,78%
		Respon time tanggap bencana	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan yang tertangani	90%	100%	111,1%
		Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana	100%	0%	0%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun, tahun 2021 dan tahun 2022 ada 2 (dua) indikator kinerja yang mencapai target yaitu indikator kinerja Respon time tanggap bencana dan indicator kinerja Persentase peningkatan luasan kebakaran hutan dan lahan yang tertangani sedangkan indicator kinerja jumlah desa tangguh yang terbentuk diharapkan sampai akhir tahun pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu tahun 2026 dapat mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Jumlah desa tangguh yang terbentuk

Selama tahun 2015-2022 telah terbentuk 20 desa tangguh bencana yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur . Adapun desa tangguh tersebut antara lain :

 - Tahun 2015** telah dibentuk 2 (dua) desa tangguh yaitu desa Eka Bahurui Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (desa tangguh kebakaran) dan desa Hanjalipan Kecamatan Kota Besi (desa tangguh Banjir.

- **Tahun 2016** telah dibentuk 2 (dua) desa tangguh yaitu desa Bagendang Permai Kecamatan Mentaya Hilir Utara (desa tangguh kebakaran) dan desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu (desa tangguh banjir).
 - **Tahun 2017** telah dibentuk 4 (empat) desa tangguh yaitu Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit (Tangguh Kebakaran), Desa Kandan Kecamatan Kota Besi (Desa Tangguh Kebakaran) , Desa Tanjung Jariangau (Desa Tangguh Banjir) dan desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit (desa tangguh banjir)
 - **Tahun 2018** telah terbentuk juga 3 (tiga) desa tangguh yaitu di desa Ganepo Kecamatan Seranau (Desa tangguh kebakaran), di desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang (Desa tangguh Kebakaran) dan desa Tumbang Tilap Kecamatan Bukit Santuai (Desa Tangguh Banjir).
 - **Tahun 2019** telah terbentuk juga 2 (dua) desa tangguh yaitu di desa Terantang Kecamatan Seranau (Desa tangguh kebakaran) dan desa Bajarau Kecamatan Parenggean (Desa Tangguh Banjir).
 - **Tahun 2021** telah terbentuk desa tangguh banjir yaitu di desa Sungai Ubar Kecamatan Cempaga Hulu.
 - **Tahun 2022** telah terbentuk 2 (dua) desa tangguh, di Kelurahan Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu sebagai desa tangguh banjir, sedangkan desa Pundu di kecamatan Cempaga Hulu sebagai tangguh kebakaran.
 - **Rencana Tahun 2023** akan dibentuk 1 (satu) desa tangguh, yaitu di desa Satiruk kecamatan Pulau Hanaut sebagai desa tangguh kebakaran..
2. Indikator kinerja Respon time tanggap bencana baik di Tahun 2021 dan di Tahun 2022 pencapaian kinerja telah mencapai target. Keberhasilan capaian ini tidak terlepas dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Kotawaringin yang siaga sepanjang 24 jam, sehingga setiap kali ada laporan kejadian bencana segera ditindak lanjuti. Selain itu telah terbentuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kecamatan rawan bencana Karhutla, sehingga ketika terjadi Karhutla segera ditangani. Untuk Status KLB (Kasus Luar Biasa), Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang dikoordinir BPBD Kabupaten Kotawaringin beserta Instansi terkait membentuk Satuan

Tugas untuk penanganan Virus Covid 19.

3. Indikator kinerja Prosentase peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan yang tertangani dilaksanakan pada Tahun 2021, karena indikator kinerja sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 ada penambahan indikator kinerja jadi 4 (empat) indicator kinerja sasaran dari Renstra sebelumnya yang memuat 3 (tiga) indicator kinerja sasaran. Untuk tahun 2022 indikator kinerja sasaran melampaui target dari 80 % terealisasi 100 % dengan capaian kinerja 125 %.
4. Sejak tahun 2021 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana pasca bencana tidak dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur karena dialihkan ke instansi teknis yaitu Dinas PU dan PR Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga dalam kurun 2 (dua) tahun tersebut indicator kinerja Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana tidak mencapai target dan tidak terealisasi.

2.1.3 Capaian Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2022

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) , Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur memenuhi pelayanan dasar Sub Urusan Bencana kepada masyarakat yang tertuang dalam implementasi SPM Sub Urusan Bencana sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana
- e) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran

Selanjutnya Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga

negara secara minimal, sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target SPM Sub Urusan Bencana yang paling mendasar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan indikator target pencapaian

sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL 2.18
TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana	100%
	2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
	3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

3

3. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Realisasi pencapaian SPM Sub Bagian Urusan Bencana adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 19
Capaian SPM Sub Urusan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pelayanan	Perhitungan Capaian	Realisasi (%)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Informasi Rawan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100
			Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dengan dinyatakan Sah/Legal	0
			Persentase penyelesaian dokumen Renkon (Rencana Kontijensi) sampai dinyatakan Sah/Legal	0

			Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	0,28
			Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0,10
			Persentase warga negara yang mendapat layanan Pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100
			Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0
			Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap kasus darurat bencana	100
			Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100
			Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	60,07

TABEL 2.20
CAPAIAN PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2022

BIDANG URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR		INDIKATOR KINERJA		TARGET CAPAIAN	CAPAIAN KINERJA
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Persentase penduduk di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana	100%	100
	2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100

	3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	60,1 %
CAPAIAN RATA-RATA						86,70 %

Berdasarkan tabel di atas untuk capaian kinerja SPM sub Bencana pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur pada 2 (dua) indikator kinerja yaitu Prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana dan Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana masing-masing jenis pelayanan dasar memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100 %, sedangkan indikator kinerja Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di bawah target yaitu 60,1 % namun demikian capaian rata-rata kinerja SPM Sub Bencana ini sebesar **86,70 %** yang artinya masuk kategori **tinggi** . Jika dibandingkan capaian kinerja capaian kinerja mengalami peningkatan kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 20,1 % seperti yang dijelaskan tabel berikut :

Tabel. 2.21
Evaluasi kinerja Tahunan Pelayanan SPM

No.	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi	
		Tahun 2021	Tahun 2022
Urusan Trantibum Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota			
1	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	49,6 %	100 %
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	54%	100 %
3	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	96,2%	60,1 %
CAPAIAN RATA-RATA		66,6 %	86,70 %

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM

Untuk pemenuhan capaian kinerja SPM Sub Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 telah dianggarkan sebesar Rp. 5.095.180.000,- berasal dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 895.180.000,- dan dari dana DBH - DR sebesar Rp.4.200.000.000,-. Dana tersebut untuk membiayai 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan yang mendukung pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur. Masing-masing alokasi anggaran berdasarkan jenis pelayanan dasar sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar Rp. 908.400.000,-.
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp. 809.490.000,-.
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp. 3.377.290.000,-

Untuk lebih jelasnya alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung SPM sub bencana pada BPBD kabupaten Kotawaringin Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Sub Urusan Bencana Tahun Anggaran 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
I	Program Penanggulangan Bencana	5.095.180.000	1.512.471.451 atau 29,68%
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten /Kota	908.400.000	388.914.000 atau 42,81 %
	Sub KegiatanPenyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/kota	400.000.000	237.234.000 atau 59,31 %
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (DBH DR)	508.400.000	151.680.000 atau 29,83 %
2	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	809.490.000	346.379.773 atau 42,79 %
	Sub Kegiatan Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	135.000.000	126.206.708 atau 93,49 %
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	624.490.000	220.173.065 atau 35,26 %
	Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	-
3	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.377.290.000	777.177.678,- atau 23,01 %
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	90.000.000	70.207.715 stau 78,01 %
	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Kabupaten/Kota	50.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kabupaten/Kota	50.000.000	10.000.000 atu 20,00 %
	Sub Kegiatan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (DBH DR 2022)	3.187.290.000	696.969.963 atau 21,07 %

Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran program/kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung SPM urusan bencana untuk tahun 2022 hanya 29,68 %. Rendahnya realisasi ini karena anggaran terbesar yang mendukung SPM Sub Urusan Bencana adalah Sub Kegiatan Sistem Komando Penanganan Darurat yaitu Rp. 3.187.290.000,- yang bersumber

dari dana DBH-DR dengan realisasi hanya 21,87 % , hal ini disebabkan kegiatan Pos Komando Kebakaran Hutan dan Lahan tidak dilaksanakan karena curah hujan yang tinggi, sehingga hanya melakukan patrol keliling ke daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan. Namun demikian, rendah realisasi anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur dalam pencapaian SPM dengan realisasi capaian yang tinggi yaitu 86,70 %.

2.1.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam penggunaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Pelaksanaan tahun 2022. Namun karena terbatasnya anggaran yang disediakan melalui APBD Kabupaten kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam RENJA dilaksanakan dengan dana yang terbatas bahkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya pergeseran anggaran untuk menambah kekurangan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Dalam mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam apaian Kinerja Organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menganggarkan melalui APBD Tahun 2022 unuk sasaran pokok melalui program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara rinci besarnya anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 2.22
ALOKASI DAN ANGGARAN TAHUN 2022

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,834,259,076	5,931,305,467	86,79
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,027,684,162	2,620,170,511	86,54
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,000,000	73,077,920	91,35
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	645,500,000	565,055,961	87,54
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	959,142,200	868,713,962	90,57

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,286,804,826	1,132,563,660	88,01
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835,127,888	671,723,453	80,43
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		5,095,180,000	1,512,471,451	29,68
1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	908,400,000	388,914,000	42,68
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	809,490,000	346,379,773	42,79
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3,377,290,000	777,177,678	23,01
JUMLAH		11,929,439,076	7,443,776,918	62,40

Apabila dilihat dari Tabel diatas, jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 2 (dua) program adalah sebesar **Rp. 11.929.439.076,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.443.776.918,-** atau **62,40 %**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan program kegiatan untuk rutin// rumah tangga dan operasional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur alokasi anggaran sebesar **Rp. 6,834,259,076** dan terealisasikan sebesar **Rp. 5.931.305.467,-** atau **86,79 %**
2. Program Penanggulangan Bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran yaitu Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dengan 3 (tiga) indicator kinerja yaitu (1) Jumlah Desa Tangguh yang Terebentuk, (2) Resson Tanggap Bencana dan (3) Prosentase Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Dilaksanakan Pasca Bencana dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.095.180.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 1.512.471.451,-** atau **29,68 %**.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat di uraikan pada **Tabel TC.29**.

Tabel TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN 2022 DAN PENCAPAIAN RENSTRA - PD
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB.KOTIM

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah 2024	Realisasi Target kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Sampai Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2023	
					Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	BPBD KAB.KOTAWARINGIN TIMUR		100%	73,23 %	100%	62,40%	62,40%	100%	235,65%	58,91
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	82,77	100%	100%	86,79%	100%	282,77%	70,69
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun menetapkan dokumen penganggaran	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	25,0%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 dokumen	0	8 dokumen	0	0	8 dokumen	8 dokumen	2 dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	0	0	0	0	0	4 dokumen	4 dokumen	1

						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 Dokumen	0	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	2 dokumen	0,5	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase PD dalam penyelesaian Adiminstrasi Keuangan Tepat Waktu	<u>100%</u>	<u>93,81 %</u>	<u>100%</u>	<u>86,54</u>	<u>86,54</u>	<u>100%</u>	<u>280,35%</u>	<u>70,08</u>	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan kinerja ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	42 bulan	10,5	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen Administrasi Kepegawaian, ANJAB ABK	57 dokumen	0	57 dokumen	0	0	57 dokumen	57 dokumem	14,25	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah usulan surat pertanggungjawaban keuangan yang telah diverikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun Tepat Waktu	14 laporan	0	14 laporan	0	0	14 laporan	14 laporan	3,5	
						Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun Tepat Waktu	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0	0	0	0	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Kepegawaian	<u>100%</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>	<u>91,35%</u>	<u>91,35%</u>	<u>100%</u>	<u>191,35%</u>	<u>47,83</u>	
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya administrasi kepegawaian ASN	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 orang	0	20 orang	20 orang	91,35	20 orang	40 orang	10	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Umum	<u>100%</u>	<u>91,06</u>	<u>100%</u>	<u>87,54%</u>	<u>87,54%</u>	<u>100%</u>	<u>278,6 %</u>	<u>69,65</u>	

						Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	95,33	1 paket	3 paket	0,75
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan ATK Kantor	1 paket	0	1 paket	1 paket	95,56	1 paket	2 paket	0,5
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya fasilitas jasa cetak dan penggandaan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	78,45	1 paket	3 paket	0,75
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya sarana bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.825 Dokumen	0	1.825 Dokumen	910 dokumen	44,95	1.825 Dokumen	2735 dokumen	683,75
						Penyediaan bahan /material		1 paket	1 paket	0	0	0	1 paket	2 paket	0,5
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang terfasilitasi	12 laporan	6 laporan	12 laporan	12 laporan	86,29	12 laporan	30 laporan	7,5
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	89,33	60 laporan	180 laporan	45,0
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase PD dalam Mengelola Barang Milik Daerah	<u>100%</u>	<u>66,38%</u>	<u>100%</u>	<u>90,57%</u>	<u>90,57%</u>	<u>100%</u>	<u>258,95%</u>	<u>64,73</u>
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	7 unit	7 unit	81,80	0	7 unit	1,75
						Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	0	0	2 unit	2 unit	94,26	2 unit	4 unit	1
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	7 unit	7 unit	7 unit	97,66	3 unit	17 unit	4,25
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase PD dalam Penyediaan Jasa Penunjang	<u>100%</u>	<u>94,77%</u>	<u>100%</u>	<u>88,01%</u>	<u>88,01%</u>	<u>100%</u>	<u>282,78%</u>	<u>70,69</u>
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100,00	12 laporan	36 laporan	9
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	73,84	12 laporan	36 laporan	9

						Penyediaam Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	90,06	12 laporan	36 laporan	9
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase PD dalam melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<u>100%</u>	<u>91,15 %</u>	<u>100%</u>	<u>80,43%</u>	<u>80,43%</u>	<u>100%</u>	<u>271,58%</u>	<u>67,89</u>
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 unit	35 unit	35 unit	20 unit	65,23	35 unit	90 unit	22,5
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	32 unit	0	20 unit	8 unit	32,90	32 unit	40 unit	10,0
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor/bangunan lainnya	1 unit	2 unit	2 unit	2 unit	94,39	4 unit	8 unit	2,0
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarpras gedung kantor dan bangunan lainnya	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	32,19	2 unit	6 unit	1,50
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarpras Pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	10 unit	8 unit	10 unit	10 unit	99,10	10 unit	28 unit	7,0
						Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasikan	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0,0</u>
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Kab. Kotim	0	0	0	0	0	0	0	0,0
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara terencana, tepat dan cepat	<u>100%</u>	<u>93,70 %</u>	<u>100%</u>	<u>29,68%</u>	<u>29,68%</u>	<u>100%</u>	<u>223,38%</u>	<u>55,88</u>
						Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Prosentase Masyarakat didaerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana melalui sosialisasi,edukasi	<u>100%</u>	<u>99,02 %</u>	<u>100%</u>	<u>42,81%</u>	<u>42,81%</u>	<u>100%</u>	<u>241,83%</u>	<u>60,45</u>

						Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana	0	0	1 dokumen	1 dokumen	59,31	1 dokumen	1 dokumen	0,25
						Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. (Per jenis Bencana)	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 orang	200 orang	300 orang	95,15	95,15	300 orang	800 orang	200
						Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<u>100%</u>	<u>97,57 %</u>	<u>100%</u>	<u>42,79%</u>	<u>42,79%</u>	<u>100%</u>	<u>240,36%</u>	<u>60,09</u>
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab	Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Kotim	0	0	0	0	0	1 Dokumen	1 dokumen	0,25
						Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)	Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (Rekon) di Kab. Kotim	0	0	0	0	0	0	0	0
						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab.	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana untuk Warga Negara maupun Aparatur di Kawasan Rawan Bencana	0	0	200 orang	200 orang	93,49	200 orang	400 orang	100
						Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab	Tersedianya Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	1 dokumen	0	3 dokumen	1 dokumen	38,92	4 dokumen	5 dokumen	1,25
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah	400 orang	0	100 orang	0	0	0	0	0
						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Tersedianya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30 unit	0	0	0	0	50 unit	50 unit	12,5

						Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	2 kawasan	2 kawasan	0	0	0	3 kawasan	5 kawasan	1,25
						Penanganan Pasca Bencana Kab	Terlaksananya penanganan pasca bencana kab/kota	0	0	0	0	0	1 paket	1 paket	0,25
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab	Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial	50 orang	0	0	0	0	10 orang	10 orang	2,50
						Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Terespon secara cepat setiap KLB dan Darurat Bencana	100%	84,51 %	100%	23,01%	23,01%	100%	207,52%	51,88
						Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	0	4 dokumen	0	0	0	0	4 dokumen	1,00
						Respon Cepat Darurat Bencana Kab	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 dokumen	0	4 dokumen	4 dokumen	78,01	4 dokumen	8 dokumen	2,00
						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang aman	0	0	0	0	0	100 orang	100 orang	25,0
						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	100 orang	100 orang	20 orang	20,00	200 orang	320 orang	80,00
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat kab/kota	0	0	6 laporan	1 laporan	21,87	6 laporan	7 laporan	1,75

						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Terpenuhi Sistem Dasar Penanggulangan Bencana di Kab. Kotim	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>25,00</u>
						Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	0,25
						Penguatan Kelembagaan Bencana Kab	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan bencana daerah	0	0	0	0	0	1 dokumen	1 dokumen	0,25
						Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	<u>0%</u>	<u>50,88 %</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>50,88%</u>	<u>12,72</u>
						Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	<u>0%</u>	<u>50,88 %</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>	<u>50,88%</u>	<u>12,72</u>
						Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	0	4 laporan	0	0	0	0	4 laporan	1,00

[illegible]

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur belum sepenuhnya 100%. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana, untuk itu diperlukan penjelasan dalam bentuk pelatihan maupun sosialisai kebencanaan. Perlu kesadaran masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur yang hidup di daerah rawan bencana untuk dapat hidup berdampingan dengan bencana tanpa menimbulkan atau meminimalkan dampak korban bencana.

Dokumen atau aturan tentang kebencanaan sampai saat ini masih minim karena BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur baru memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan aturan yang lain masih perlu dibuat untuk melengkapinya. Dalam pelayanan tanggap darurat BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur sudah berusaha semampunya dengan personil yang ada melayani masyarakat yang terdampak bencana berupa bantuan logistik maupun sarana-prasarana pendukung lainnya.

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berisikan capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0413/Huk-ORG/2021 Tanggal 15 Nopember 2021** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat dan Daerah dan sesuai dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018** tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut sebagai berikut :

A. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja BPBD Kotawaringin Timur tahun 2022 untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 230/PMK/07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan dan Reboisasi.
3. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan;
4. Semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi;
5. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana;
6. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban;
7. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat.

B. Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja

Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi penyebab kegagalan yang perlu menjadi perhatian, diantaranya:

1. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam
2. Terbatasnya anggaran yang tersedia, sehingga target yang direncanakan pada RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama lima tahun tidak bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan
3. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana.

C. Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan

Terhadap permasalahan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan meliputi:

1. Penambahan anggaran agar kegiatan-kegiatan yang menyokong Indikator sasaran Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur lebih banyak terakomodir, sehingga target yang direncanakan pada RPJMD dan RENSTRA Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan.

2. Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam usaha mitigasi risiko bencana
3. Memfasilitasi Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam evakuasi dan assesment awal bencana;
4. Memfasilitasi Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);
5. Melalui program pemerintah pusat, membangun koordinasi dengan berbagai stakeholder melalui forum pengurangan risiko bencana.

Capaian Pelayanan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada **tabel TC.30**.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga teknis daerah yang telah dibentuk di Kabupaten Kotawaringin Timur, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan tugas pokok, sebagai lembaga teknis daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dan program partisipasi dan penanggulangan bencana
2. Penyusunan protap penanggulangan bencana
3. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
4. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan
5. Perencanaan ,pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
6. Pelaksanaan program Rehalibitasi dan Rekronstruksi penanggulanagan

Tabel TC.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kab. Kotim

NO	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK/IKU	Target Renstra SKPD						Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6				7	9			11	12	13
Indikator Kinerja Utama BPBD															
RENSTRA BPBD TAHUN 2021-2026															
	Tersedianya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana	-	3 dokumen	1 dok	2 dok	-	-	-	-	-	-	1 dok	1 dok	1 dok	
	% desa tangguh yang terbentuk	-	100%	9.1%	9.1%	13.6%	22.7%	22.7%	22.7%	100%	50%	100%	3 desa	3 desa	
	Respon time tanggap bencana	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan yang tertangani	-	100%	75%	80%	85%	85%	90%	90%	100%	30.50%	100%	85%	85%	
	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana	-	100%	20%	20%	25%	20%	25%	20%	100%	0%	0%	100%	100%	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)															
	Prosentase penduduk didaerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.20%	100%	100%	100%	
	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53.50%	100%	100%	100%	
	Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.20%	60,1%	100%	100%	

pasca bencana;

7. Pelaksanaan kegiatan tatausaha badan ; dan
8. Pengoptimalisasian kinerja badan mencapai visi dan misi Kabupaten;

Selain fungsi sebagaimana dimaksud di atas, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dalam fungsi koordinasi, BPBD melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana. Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur adalah

1. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Kotawaringin Timur
2. Kapasitas gedung untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana belum optimal
3. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana
4. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur
5. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur dibandingkan dengan banyaknya desa yang rawan dan risiko bencana
6. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur
7. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur
8. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di

Kabupaten Kotawaringin Timur

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur . Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana adalah :

1. Tingkat kerawanan bencana di Kab.Kotawaringin Timur tinggi baik alam maupun non alam, dengan luas wilayah Kab. Kotawaringin Timur
2. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah
3. Sumberdaya manusia di BPBD Kab. Kotawaringin Timur sangat terbatas, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas maupun bidang/ tanggungjawab pekerjaan.
4. Peningkatan tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan dan kebakaran

Terlepas dari besarnya tantangan yang dihadapi ada peluang yang dapat dimanfaatkan, yaitu diterbitkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangulangan Bencana yang diikuti dengan terbitnya Peraturan-peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB. Peluang-peluang lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah:

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana
2. Peningkatan kecepatan akses informasi.
3. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan OPD Teknis, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan dinas lain yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan program terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh OPD teknis. OPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam OPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing OPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang dan

aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.

4. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan
5. Adanya nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan yang masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat

Mengingat perubahan Iklim yang semakin tidak terduga sehingga menyebabkan Daerah rawan Bencana semakin meluas maka perlu diperkuat Pelayanan Kebencanaan dengan penguatan kapasitas baik Masyarakat, Dunia Usaha maupun Aparatur di seluruh Kabupaten Kotawaringin Timur, namun semua itu harus ditunjang dengan pemberian Pagu Anggaran yang sangat relevan oleh TAPD.

Setelah mereview semua tantangan, hambatan, kekuatan dan kelemahan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka dapat diformulasi **isu isu dan berupa rekomendasi maupun catatan strategis untuk dapat ditindaklanjuti dalam perumusan Program/Kegiatan tahun 2024** sebagai berikut :

1. Menyiapkan Desa Tangguh Bencana di daerah rawan bencana
2. Menyusun kelengkapan pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur seperti dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontijensi (Rekon)
3. Pemenuhan kapasitas gedung untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana yang optimal
4. Sosialisasi tanggap bencana dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat;
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
6. Pemenuhan ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kab. Kotim
7. Memberikan perlindungan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial
8. Menyusun fasilitasi rekonstruksi kebencanaan meliputi pembangunan kembali prasarana dan fasilitas masyarakat
9. Menyiapkan pelatihan keahlian bagi SDM, Tim TRC dan Tim Pusdalops.
10. Belum adanya sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau masyarakat.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review yang dilakukan terhadap Rancangan Awal RKPD adalah melakukan proses perbandingan antara rancangan awal RKPD tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2024. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, indikator, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di Rancangan Awal RKPD. Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja OPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan hasil sebagai berikut :

1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan operasional kantor dengan penekanan :
 - Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 22 orang selama 14 bulan
 - Pemenuhan TPP ASN sebanyak 22 orang selama 14 bulan
 - Pemenuhan Gaji Tenaga sebanyak 35 orang selama 13 bulan
 - Pemenuhan Rutin Kantor selama 12 bulan
2. Melaksanakan penyesuaian pagu anggaran prioritas terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
3. Prioritas anggaran terhadap pemenuhan SPM Sub Urusan Bencana ;
4. Sisa pagu anggaran untuk pemenuhan hasil usulan Musrenbang RKPD Tahun 2024.

Review terhadap rancangan awal RKPD tertuang di dalam **tabel TC.31**.

2.5 Penelahan Usulan Dengan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Khusus untuk

TABEL TC.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TA 2024

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
	BPBD KAB.KOTIM			100%	7,468,568,700					7,987,168,700	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BPBD KAB	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	6,067,568,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	BPBD KAB	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%	5,987,168,700	
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD yang menyusun menetapkan dokumen penganggaran tepat waktu	100%	20,000,000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD yang menyusun menetapkan dokumen penganggaran tepat waktu	100%	20,000,000.00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	10,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	10,000,000.00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	10,000,000.00	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam penyelesaian Adiminstrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	2,890,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam penyelesaian Adiminstrasi Keuangan Tepat Waktu	100%	2,952,414,872	
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2,865,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	2,927,414,872	
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	10,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	10,000,000.00	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 dokumen	10,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	

10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 laporan	5,000,000.00	
11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	10,000,000.00	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Kepegawaian	100%	150,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Kepegawaian	100%	150,000,000	
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 orang	150,000,000	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Kab. Kotim	-	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Terlaksananya Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Kab. Kotim	-	-	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Umum	100%	660,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Umum	100%	660,000,000	

15	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 bulan	15,000,000	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 bulan	15,000,000	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	65,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	65,000,000	
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	35,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	35,000,000	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	20,000,000	
19	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	25,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	25,000,000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	1 tahun	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	1 tahun	500,000,000	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Mengelola Barang Milik Daerah	=	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Mengelola Barang Milik Daerah	100%	200,000,000	
21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	200,000,000	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Penyediaan Jasa Penunjang	100%	1,700,568,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam Penyediaan Jasa Penunjang	100%	1,403,000,000	

22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,000,000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150,000,000	
VII	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,547,568,700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,250,000,000	
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	647,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BPBD KAB	Persentase PD dalam melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	601,753,828	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	600,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 tahun	554,753,828	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun	12,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 tahun	12,000,000	
27	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	
28	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun	25,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun	25,000,000	

29	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun	10,000,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 tahun	10,000,000	
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	KAB.KOTI M	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara terencana, tepat dan cepat	<u>100%</u>	<u>1,401,000,000</u>	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	KAB.KOTI M	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara terencana, tepat dan cepat	<u>100%</u>	<u>2,000,000,000</u>	
VIII	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	KAB.KOTI M	Prosentase Masyarakat didaerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana melalui sosialisasi,edukasi	<u>100%</u>	<u>350,000,000</u>	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	KAB.KOTI M	Prosentase Masyarakat didaerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana melalui sosialisasi,edukasi	<u>100%</u>	150,000,000.00	
30	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 dokumen	250,000,000	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab		Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	-	-	
31	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab.(Per jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 orang	100,000,000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab.(Per jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 orang	150,000,000	
32	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KAB.KOTI M	Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<u>100%</u>	<u>651,000,000</u>	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	KAB.KOTI M	Prosentase Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<u>100%</u>	<u>1,000,000,000</u>	

33	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	-	-	
34	Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	-	-	Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 dokumen	250,000,000	
35	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab.		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 orang	100,000,000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab.		Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	150 orang	100,000,000	
36	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	100,000,000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	150,000,000	
37	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	76,000,000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	-	100,000,000	
38	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 desa	300,000,000	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	6 desa	300,000,000	
39	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 orang	75,000,000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	50 orang	100,000,000	
IX	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KAB.KOTIM	Presentase Terespon secara cepat setiap KLB dan Darurat Bencana	100%	275,000,000	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	KAB.KOTIM	Presentase Terespon secara cepat setiap KLB dan Darurat Bencana	100%	675,000,000	

40	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-	-	
41	Respon Cepat Darurat Bencana Kab		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	laporan	100,000,000	Respon Cepat Darurat Bencana Kab		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 'laporan	200,000,000	
42	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	laporan	75,000,000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 laporan	75,000,000	
43	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	200 Paket	100,000,000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Paket	400,000,000	
X	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KAB.KOTIM	Persentase Terpenuhi Sistem Dasar Penanggulangan Bencana di Kab. Kotim	100%	125,000,000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	KAB.KOTIM	Persentase Terpenuhi Sistem Dasar Penanggulangan Bencana di Kab. Kotim	100%	175,000,000	
44	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	25,000,000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	-	25,000,000	
45	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	-	-	
46	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	-	-	

[illegible]

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur , telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan berupa usulan kegiatan.

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam bidang penanggulangan bencana, terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2024. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada **tabel TC.32**.

Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Kotawaringin Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A	Program Penanggulangan Bencana				
I	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
1	Sub kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Desa Bapinang Hilir Laut, Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 desa	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Desa Tangguh Banjir
		2 Desa Makarti Jaya, Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 desa	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Desa Tangguh Banjir
		3 Desa Parit, Kab.Kotawaringin Timur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 desa	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Desa Tangguh Banjir

		4 Desa Tewai Hara, Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 desa	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Desa Tangguh Banjir
		5 Desa Tukang Langit, Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 desa	Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Desa Tangguh Banjir
		6 Desa Jaya Kepala, Kab. Kotawaringin Timur	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan dan Desa Tangguh Banjir



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota perencanaan dan tindakan penanggulangan bencana menjadi pedoman dan acuan dalam bentuk perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana apabila diintegrasikan dengan Kebijakan Nasional meliputi :

1. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum.
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana.
5. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN.
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
7. Pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan nilai dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. **Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim, melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan dan penegakan hukum pencemaran lingkungan, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, dan memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;**
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;

7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Agenda Pembangunan Nasional (NAWA CITA):

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. **Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik;**
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Agenda Pembangunan 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik, dengan fokus:

1. Peningkatan Kedaulatan Pangan;
2. Kedaulatan Energi;
3. Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
4. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;
5. Penguatan Sektor Keuangan;
6. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional yang diamanatkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Visi Presiden: **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong** maka visi BNPB kurun waktu 2020-2024 adalah :

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”

Visi tersebut merupakan gambaran terhadap apa yang ingin diwujudkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yaitu bagaimana negara secara tangguh mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan

menjauhkan masyarakat dari bencana. menjauhkan bencana dari masyarakat. meningkatkan kemampuan daya lenting masyarakat untuk pulih kembali dari dampak bencana. Ketangguhan sebagai budaya hidup harmonis berdampingan dengan ancaman bencana yang mampu mengantisipasi. mengadaptasi. memproteksi. Serta menghindari/meminimalisir dampak bencana. serta memiliki daya serap informasi. Ketangguhan masyarakat secara mandiri dalam penanggulangan bencana menjadi yang pertama dalam setiap upaya penanggulangan bencana.

Misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana.

Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam.

Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, **tujuan BNPB** tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, sasaran strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, **sasaran strategis BNPB** 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana.
4. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula indikatornya dalam format indikator kinerja sasaran strategis.

Selain itu berdasarkan hasil penelaahan terhadap Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, diketahui bahwa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana dilakukan melalui:

1. Pelayanan informasi rawan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana.
 - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang meliputi:
 - a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

- b. Pembuatan Rencana Kontinjensi.
 - c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/kota.
 - d. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan. Terhadap Bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yang meliputi:
- a. Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis.
 - b. Respon cepat darurat bencana Kabupaten/kota
 - c. Penyediaan logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota
 - d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
 - e. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - f. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, maka selanjutnya BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah sesuai dengan ketugasan dan fungsi yang diemban BPBD Kab.Kotawaringin Timur selaku Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati yang didukung.

A. Tujuan

Mengacu pada tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur, maka selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama lima tahun sesuai dengan ketugasan dan fungsi yang diemban Penanggulangan Bencana Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku Perangkat Daerah. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur . Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana mempunyai peran dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik sebelum kejadian bencana saat terjadi bencana hingga pasca

bencana. Dalam rangka mendorong tercapainya mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama Misi kelima Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya, merumuskan dan menetapkan **tujuan** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kurun waktu tahun 2021-2026 adalah **“Peningkatan Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah”** yaitu dengan meningkatkan kemampuan kelembagaan Pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan sarana dan prasarana serta pelaksanaan koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana dan meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana.

B. Sasaran

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ingin dicapai untuk 5 (lima) tahun ke depan yaitu **“Meningkatnya penanganan Penanggulangan Bencana”**. Dengan pelayanan penanganan atau penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian untuk pengurangan resiko bencana dengan tanggap dan tangguh yang dimulai saat menerima informasi dari warga atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian bencana yang langsung melakukan penanganan bencananya. Tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana yaitu **“Tanggap”** berarti peka atau paling tidak mengenali gejala – gejala atau potensi bencana yang akan terjadi di wilayahnya. **“Tangguh”** berarti memiliki ketahanan (resilience) dalam menghadapi resiko bencana yaitu dengan melakukan antisipasi dan persiapan seoptimal mungkin ketika bencana terjadi.

Untuk memberikan capaian hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, prioritas sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Meningkatkan Pelayanan Penanggulangan Bencana, dengan indikator kinerja :

1. Tersedianya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. % desa tangguh yang terbentuk
3. Respon time tanggap bencana
4. Prosentase peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan yang tertangani
5. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana

6. Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan pasca bencana

3.3 Program dan Kegiatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan transformasi Pelayanan Publik.

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja BPBD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan BPBD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan **Peningkatan Kapasitas Pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah** dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat;
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 33 Sub kegiatan termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

I. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

III. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah

V. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

I. Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. (Per jenis Bencana)

II. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)

2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab.
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab
4. Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab

III. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Respon Cepat Darurat Bencana Kab
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

IV. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab
2. Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung program responsif gender adalah Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang diikuti oleh peserta laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan. Sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana terutama untuk perempuan, dimana perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial yang berbeda. Peran sosial yang dilekatkan masyarakat kepada perempuan dan laki-laki berbeda, beban perempuan dan anak perempuan lebih berat kewajiban merawat dan memelihara anggota keluarga, selain merawat keluarga sendiri juga seringkali harus merawat anak dan kerabat lain yang keluarganya menjadi korban bencana.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel TC.33**.

Tabel TC.33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KAB.KOTAWARINGIN TIMUR

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR				7,987,168,700				7,968,568,700
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	<u>BPBD KAB Kotim</u>	<u>orang/paket/unit/laporan/dokumen</u>	<u>5,987,168,700</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>orang/paket/unit/laporan/dokumen</u>	<u>6,268,568,700</u>
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya PD dalam menyusun menetapkan dokumen penganggaran tepat waktu	<u>BPBD KAB Kotim</u>	<u>10 Dokumen</u>	<u>20,000,000</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>10 Dokumen</u>	<u>30,000,000</u>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		8 Dokumen	10,000,000			8 Dokumen	15,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-	-			-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-	-			-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-	-			-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-			-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	10,000,000			2 Dokumen	15,000,000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya PD dalam penyelesaian Adiminstrasi Keuangan Tepat Waktu	<u>BPBD KAB Kotim</u>	<u>30 orang/dokumen/Laporan</u>	<u>2,952,414,872</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>30 orang/dokumen/Laporan</u>	<u>3,050,000,000</u>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 orang	2,927,414,872			22 orang	3,000,000,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		3 Dokumen	10,000,000			3 Dokumen	15,000,000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-	-			-	20,000,000
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 laporan	10,000,000			1 laporan	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		14 laporan	5,000,000			14 laporan	15,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Kepegawaian	BPBD KAB Kotim	57 orang	150,000,000	APBD KAB		79 orang	120,000,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		-	-			22 orang	20,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		57 orang	150,000,000			57 orang	100,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Kab. Kotim		-	-			-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya PD dalam Penyelesaian Pengadministrasi Umum	BPBD KAB Kotim	1.942 Paket/Dokumen/Laporan	660,000,000	APBD KAB		1.942 Paket/Dokumen/Laporan	685,000,000
	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15,000,000			1 Paket	15,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		1 Paket	65,000,000			1 Paket	65,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 paket	35,000,000			1 paket	35,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1.825 Dokumen	20,000,000			1.825 Dokumen	25,000,000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		-	-			-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	25,000,000			12 laporan	45,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 laporan	500,000,000			90 laporan	500,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya PD dalam Mengelola Barang Milik Daerah	<u>BPBD KAB Kotim</u>	<u>1 paket</u>	<u>200,000,000</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor		1 paket	200,000,000			-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya PD dalam Penyediaan Jasa Penunjang	<u>BPBD KAB Kotim</u>	<u>36 laporan</u>	<u>1,403,000,000</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>36 laporan</u>	<u>1,863,568,700</u>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	3,000,000			12 laporan	7,500,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	150,000,000			12 laporan	175,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	1,250,000,000			12 laporan	1,681,068,700
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya PD dalam melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	<u>BPBD KAB Kotim</u>	<u>95 Unit</u>	<u>601,753,828</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>95 Unit</u>	<u>520,000,000</u>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35 unit	554,753,828			35 unit	450,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 unit	12,000,000			30 unit	35,000,000
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	-			-	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		20 unit	25,000,000			20 unit	25,000,000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	10,000,000			10 unit	10,000,000
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat secara terencana, tepat dan cepat	<u>KAB. KOTIM</u>	<u>orang/paket/unit/l aporan/dokumen</u>	<u>2,000,000,000</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>orang/paket/unit/l aporan/dokumen</u>	<u>1,700,000,000</u>
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kibupaten/Kota	Prosentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana melalui sosialisasi,edukasi	<u>KAB. KOTIM</u>	<u>150 orang</u>	<u>150,000,000</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>300 orang</u>	<u>300,000,000</u>
	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		-	-			-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab.(Per jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		150 orang	150,000,000			300 orang	300,000,000
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	<u>KAB.</u> <u>KOTIM</u>	<u>271</u> <u>orang/Dokumen/d</u> <u>esa</u>	<u>1,000,000,000</u>	<u>APBD</u> <u>KAB</u>		<u>218</u> <u>orang/Dokumen/d</u> <u>esa</u>	<u>700,000,000</u>
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		-	-			-	-
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab.	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		150 orang	100,000,000			150 orang	150,000,000
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		4 dokumen	150,000,000			-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		50 unit	100,000,000			-	-
	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		6 desa	300,000,000			8 desa	400,000,000
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		60 orang	100,000,000			60 orang	150,000,000
	Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		1 Dokumen	250,000,000			-	-
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		-	-			-	-
	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Teresponnya secara cepat setiap KLB dan Darurat Bencana	<u>KAB.</u> <u>KOTIM</u>	<u>903</u> <u>orang/dokumen</u>	<u>675,000,000</u>	<u>APBD</u> <u>KAB</u>		<u>600 orang</u>	<u>300,000,000</u>
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas		-	-			-	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Respon Cepat Darurat Bencana Kab	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		3 Dokumen	200,000,000			-	-
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		100 orang	75,000,000			-	-
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		800 orang	400,000,000			600 orang	300,000,000
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terpenuhinya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana di Kab. Kotim	<u>KAB. KOTIM</u>	<u>4 dokumen</u>	<u>175,000,000</u>	<u>APBD KAB</u>		<u>1 Dokumen</u>	<u>400,000,000</u>
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		3 dokumen	25,000,000			-	-
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		-	-			-	-

[illegible]



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dalam Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Program, 10 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakansetiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indicator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program harus diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah yang telah di tuangkan dalam aplikasi SIPD RI seperti pada **tabel 4.1**.

Tabel 4.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Uraian Belanja Prioritas	Volume	Satuan	Lokasi	Pagu Baru
1	2	3	4	5	7
BPBD KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR					<u>7,987,168,700</u>
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>BPBD Kab. Kotim</u>	<u>5,987,168,700.00</u>
I	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>BPBD Kab. Kotim</u>	<u>20,000,000</u>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	Dokumen	BPBD Kab. Kotim	10,000,000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	Dokumen	BPBD Kab. Kotim	10,000,000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>BPBD Kab. Kotim</u>	<u>2,952,414,872</u>
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang	orang	BPBD Kab. Kotim	2,927,414,872
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57 Dokumen Pegawai/Tekon	Dokumen Pegawai/Tekon	BPBD Kab. Kotim	10,000,000

9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	-	-	-	-
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 laporan	Laporan	BPBD Kab. Kotim	5,000,000
11	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen	BPBD Kab. Kotim	10,000,000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>BPBD Kab. Kotim</u>	<u>150,000,000</u>
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30 orang	orang	BPBD Kab. Kotim	150,000,000
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>BPBD Kab. Kotim</u>	<u>660,000,000</u>
15	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	bulan	BPBD Kab. Kotim	15,000,000
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	bulan	BPBD Kab. Kotim	65,000,000
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	bulan	BPBD Kab. Kotim	35,000,000
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	bulan	BPBD Kab. Kotim	20,000,000
19	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	-
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	bulan	BPBD Kab. Kotim	25,000,000
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah	1 tahun	tahun	BPBD Kab. Kotim	500,000,000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>BPBD Kab. Kotim</u>	<u>1,403,000,000</u>
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	laporan	BPBD Kab. Kotim	3,000,000
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	laporan	BPBD Kab. Kotim	150,000,000
VII	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	laporan	BPBD Kab. Kotim	1,250,000,000
24	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>BPBD Kab. Kotim</u>	<u>801,753,828</u>
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 tahun	Tahun	BPBD Kab. Kotim	554,753,828
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 tahun	Tahun	BPBD Kab. Kotim	12,000,000
27	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1	paket	BPBD Kab. Kotim	200,000,000
28	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1 tahun	tahun	BPBD Kab. Kotim	25,000,000
29	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	1 tahun	tahun	BPBD Kab. Kotim	10,000,000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>Kab.Kotim</u>	<u>2,000,000,000</u>
VIII	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>Kab.Kotim</u>	<u>150,000,000</u>

30	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kab	-	-	-	-
31	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab. (Per jenis Bencana)	150 orang	orang	Kab. Kotim	150,000,000
32	Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>Kab. Kotim</u>	<u>1,000,000,000</u>
33	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kab	-	-	-	-
34	Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)	1 dokumen	dokumen	Kab. Kotim	250,000,000
35	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab.	150 orang	orang	Kab. Kotim	100,000,000
36	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab	1 dokumen	dokumen	Kab. Kotim	150,000,000
37	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana	150	Unit	Kab. Kotim	100,000,000
38	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	6 desa	desa	6 (enam) desa	300,000,000
39	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab	50 orang	orang	Kab. Kotim	100,000,000
IX	Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>Kab. Kotim</u>	<u>675,000,000</u>
40	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	-	-	-	-
41	Respon Cepat Darurat Bencana Kab	1 laporan	Laporan	Kab. Kotim	200,000,000
42	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten	1 laporan	Laporan	Kab. Kotim	75,000,000
43	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	400 Paket	Paket	Kab. Kotim	400,000,000

X	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	<u>100%</u>	<u>persen</u>	<u>Kab.Kotim</u>	<u>175,000,000</u>
44	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab	3 dokunen	dokumen	Kab.Kotim	25,000,000
45	Penguatan Kelembagaan Bencana Kab	-	-	-	-
46	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraaan dalam Penanggulangan Bencana Kab	-	-	-	-
47	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	Dokumen	Kab.Kotim	150,000,000



BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis 2021-2026 yang disusun untuk membantu pencapaian visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Adapun nomenklatur program, kegiatan serta sub kegiatan pada dokumen rencana kerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah.

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan demikian Rencana Kerja BPBD Tahun 2024 merupakan pedoman dasar untuk penyusunan rancangan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

5.2 Kaidah - Kaidah Pelaksanaan

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan pendekatan :

1. **Teknokratik** yaitu dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Partisipatif** yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

3. **Politis** yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Atas-bawah dan bawah-atas** yaitu merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi hingga nasional.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Keberhasilan dalam rangka mencapai target kinerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur, isi dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2024 sesuai dengan yang dicitakan dengan melaksanakan :

1. Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang memuat indikator, tolok ukur kinerja, target kinerja, kode rekening, uraian belanja per rekening, rincian perhitungan serta jumlah anggaran BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. RKA tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun 2024.
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan selama tahun pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2024 yang berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi dimaksud meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan

Dengan adanya Rencana Kerja BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini diharapkan agar pencapaian sasaran strategis OPD, target program dan kegiatan dapat lebih fokus, terintegrasi serta dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap masyarakat umum serta bagi pelayanan BPBD Kabupaten Kotawaringin Timur .

Adapun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari penerapan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Sampit, 2023

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



MULTAZAM, ST, M.MT
Pembina Utama Muda
Nip. 19680528 199903 1 004